

# **REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)**

## **INDONESIA**

**Global Environment Facility (GEF) Grant: Project Preparation Grant for the Preparation of Proposed Indonesia Sustainable Cities Impact Project**  
Grant No.: TF0B5661

**Assignment Title: Consultancy Services for Project Document Preparation for Global Environmental Facility Grants – Sustainable Cities Impact Program in Indonesia**

**Reference No.:** 05/UKPBJ.ND.ST21/06.11/10/2021

The Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency has received financing from the World Bank toward the cost of the Global Environment Facility (GEF) Grant: Project Preparation Grant for the Preparation of Proposed Indonesia Sustainable Cities Impact Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The consulting services (“the Services”) include: (a) Prepare procurement documents for the implementation of the Sustainable City Impact Program grant, (b) Initial technical analysis, risk analysis, financing analysis in 5 selected cities; and (c) Consultation and dissemination of activities in selected cities together with relevant stakeholders. The activity will be executed by 10 professional staffs (1 Team Leader, 5 Experts, 3 Junior Experts, and 1 Administration Staff) within 10 months. The consultant is expected to start the assignment on December 2021 – September 2022. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment *can be found at the following website:* [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

The Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are:

- a. Have a business license as a provider of management consulting services (KLBI 7020), Management Consulting Services / research on social science development;
- b. National business entity that has specifications for consulting services and has a Business Permit (SIUP)/Business Number-Indonesia Standard Industrial Classification (NIB-KBLI), Company Registration Certificate (TDP), and Articles of Association (AD/ART);
- c. Have a business license in Indonesia and is domiciled in Indonesia;
- d. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and Annual Tax Return (SPT) for the last year (in 2020);
- e. Have experience:
  - Work in the field of Consulting Services at least 1 (one) job within the last 1 (one) year in the government or private sector, including subcontracting experience;
  - Similar jobs based on the type of work, complexity of work, methodology, technology, or other characteristics that can describe similarities, at least 1 (one) job within the last 3 (three) years both in the government and private sector, including

proven subcontracting experience with proof of contract/reference from the user accompanied by the value of the work;

- The highest value of similar work in the last 5 (five) years is at least equal to 80% (eighty percent) of the total value of the HPS/Budget Ceiling.

Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank's "Procurement Regulations for IPF Borrowers" July 2016 and World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" November 2020, setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

A Consultant will be selected in accordance with the Consultant's Qualifications - based Selection (CQS) method set out in the Procurement Regulations.

Further information can be obtained at the address below during office hours (09.00 to 17.00).

Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below by e-mail) by 29 October 2021 – 10.00 WIB.

Jakarta, 8 October 2021

Pokja I  
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional  
Jl. Taman Suropati No.2 Menteng Jakarta Pusat  
E-mail: [ulp@bappenas.go.id](mailto:ulp@bappenas.go.id)



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Proyek Persiapan  
Hibah Fasilitas Lingkungan Global – Program Dampak  
Kota Berkelanjutan di Indonesia**

**TAHUN ANGGARAN 2021 - 2022**

**DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAERAH  
JAKARTA, 2021**

## DAFTAR ISI

### 1. BAGIAN 1: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Rencana Anggaran Biaya

### 2. BAGIAN 2: RUANG LINGKUP JASA KONSULTASI

- 2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
  - 2.1.1. Pengumpulan Data
  - 2.1.2. Pemetaan dan Penyusunan Basis Data
  - 2.1.3. Kajian dan Analisis
  - 2.1.4. *Benchmarking*
  - 2.1.5. Partisipasi Publik
  - 2.1.6. Rekomendasi Implementasi
- 2.2 Keluaran Kegiatan
- 2.3 Pelaporan
- 2.4 Jadwal Pekerjaan

### 3. BAGIAN 3: METODE PENGADAAN

- 3.1 Mekanisme Pengadaan
- 3.2 Kualifikasi Penyedia Badan Usaha Penyedia Jasa
- 3.3 Kebutuhan Personil
- 3.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data
- 3.5 Ketentuan Pemetaan dan Kompilasi Basis Data

### 4. BAGIAN 4: PENUTUP

### 5. BAGIAN 5: LAMPIRAN

**BAGIAN 1:**  
**PENDAHULUAN**

## 1. BAGIAN 1: PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

- 1.1.1. Saat ini di 53% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan mencapai 70% pada tahun 2045. Penurunan keanekaragaman hayati, perluasan kota, perencanaan yang tidak terintegrasi, dan degradasi lingkungan termasuk pola pembangunan yang tinggi karbon berimplikasi pada kualitas hidup jutaan orang Indonesia.
- 1.1.2. Program Dampak Kota Berkelanjutan Indonesia (*Sustainable Cities Impact Program/SCIP*) dari Fasilitas Lingkungan Global (*Global Environment Facility/GEF*) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kota dalam menyiapkan rencana pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi dan prioritas *capital investment planning* dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati sesuai dengan Kebijakan Perkotaan Nasional, Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN 2020-2024 (Rencana Jangka Menengah 5 Tahun).
- 1.1.3. SCIP juga diarahkan untuk memberikan dampak (*impact*) perubahan perilaku pelaku pembangunan dalam berpikir secara holistik dan berkesinambungan dalam membangun kota yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara seimbang.
- 1.1.4. Pelaksanaan proyek akan diintegrasikan dengan program-program *sustainable development* yang sedang berjalan seperti *National Urban Development Project* (NUDP) dan *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) yang memiliki tujuan akhir yang sama yakni ke arah *sustainable city* dengan menitikberatkan pembangunan rendah emisi dan rendah karbon. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan GEF ini diharapkan dapat mendukung proyek-proyek sebelumnya dalam menemukan pendekatan dan indikator kota berkelanjutan berdasarkan *lesson learned* dari kota-kota percontohan.
- 1.1.5. Selain itu, integrasi kegiatan GEF dan program program yang telah ada diharapkan dapat meningkatkan dampak dari program yang akan semakin besar dan berperan sebagai pengungkit (*leverage*) bagi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota di Indonesia.
- 1.1.6. Kegiatan SCIP akan dilaksanakan sedikitnya pada 5 kota pilot yang telah disesuaikan dengan kriteria pemilihan kota berdasarkan unsur lingkungan, ke 5 kota tersebut terdiri dari : Palembang, DKI Jakarta, Semarang, Balikpapan, dan Bitung
- 1.1.7. Untuk mempersiapkan pelaksanaan hibah SCIP yang akan dilaksanakan dengan 5 kota pilot di atas dalam waktu 5 tahun dibutuhkan persiapan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi pelaksana dan persiapan administrasi yang diperlukan dalam implementasi Proyek SCIP. Atas dasar ini pada tahun 2020-2021 dilaksanakan *Preparation of Propose Indonesia SCIP* melalui pendanaan *Project Preparation Grant* (PPG).

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1.2.1. Landasan hukum yang diacu dalam pelaksanaan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia, antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pasal 64 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Dalam hal ini mengacu ke perjanjian hibah luar negeri yang mengatur proses pengadaan barang/jasa mengikuti aturan dari regulasi pengadaan Bank Dunia yaitu “*World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers*” (November 2020).
- b. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri *Global Environment Facility (GEF) Grant TF0B5661: Project Preparation Grant (PPG) for the Preparation of Proposed Indonesia Sustainable Cities Impact Project (SCIP)*, dengan Nomor Registrasi Hibah Luar Negeri 2Y3ADTQA.

## **1.3. SASARAN**

1.3.1. Sasaran Jasa Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan hibah Program Dampak Kota Berkelanjutan (SCIP) yang dilaksanakan pada 5 kota untuk memberikan dampak (*impact*) perubahan perilaku pelaku pembangunan dalam berpikir secara holistik dan berkesinambungan dalam membangun kota yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara seimbang.

## **1.4. TUJUAN**

1.4.1. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk: (a) Mempersiapkan dokumen pengadaan pelaksanaan hibah Program Dampak Kota Berkelanjutan, (b) Analisis teknis awal, analisis risiko, analisis pembiayaan pada 5 kota terpilih; dan (c) Konsultasi dan sosialisasi kegiatan di kota terpilih bersama dengan pemangku kepentingan terkait.

## **1.5. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Kegiatan akan dibiayai melalui sumber pendanaan DIPA Direktorat Pembangunan Daerah yang berasal dari Hibah Luar Negeri *Global Environment Facility (GEF) Grant TF0B5661: Project Preparation Grant (PPG) for the Preparation of Proposed Indonesia Sustainable Cities Impact Project (SCIP)*, dengan Nomor Registrasi Hibah Luar Negeri 2Y3ADTQA, untuk periode tahun anggaran 2021–2022. Hibah ini tercatat sebagai hibah terencana dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) 2020 dengan penyaluran hibah melalui rekening khusus yang diterima sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pembangunan Daerah di bawah PPK Program PPN II Kedeputian Bidang Pengembangan Regional.

**BAGIAN 2:**  
**RUANG LINGKUP JASA KONSULTANSI**



## 2. BAGIAN 2: RUANG LINGKUP JASA KONSULTANSI

### 2.1. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Konsultan Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia melakukan kajian dan beberapa kegiatan untuk memenuhi tujuan yang telah disebut dalam Latar Belakang pada bagian 1. Ruang lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan, namun tidak terbatas pada:

- 2.1.1. **Penyiapan Rencana Pengadaan dan Strategi Pengadaan Proyek Untuk Pembangunan (PPSD)**, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan lelang paket Hibah SCIP. Adapun komponen kegiatan mencakup (i) Penyiapan dokumen pengadaan meliputi dan tidak terbatas pada *Term of Reference (TOR)*, *Request for Expressions of Interest (REOI)*, *Request for Proposal (RFP)*, serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan paket Hibah SCIP sesuai dengan ketentuan berlaku; (ii) Identifikasi paket pengadaan; (iii) Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan keuangan dan investasi proyek; dan (iv) Penyiapan dan penyusunan dokumen *Project Procurement Strategy for Development (PPSD)*.
- 2.1.2. **Dukungan Penyusunan Dokumen dan Penilaian Pengamanan**, Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan paket hibah SCIP memberikan dampak positif secara lingkungan dan sosial. Adapun komponen kegiatan mencakup (i) identifikasi nilai lingkungan dan isu sosial pengembangan kota; dan (ii) Penyusunan dokumen *Environmental and social safeguard* berdasarkan ketentuan berlaku (*donor guideline*).
- 2.1.3. **Penyusunan Dokumen Desain Proyek (PDD) dan Pedoman Operasional Proyek (PIM)**, Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan proyek secara mendetail baik dari segi perencanaan kegiatan maupun pengelolaan proyek. Adapun komponen kegiatan mencakup: (i) *City Level Assessment* ; (ii) Identifikasi rencana tata ruang terintegrasi dengan pertimbangan lingkungan; (iii) Identifikasi skema pembiayaan inovatif terintegrasi; (iv) Identifikasi pengaturan implementasi kegiatan dan desain proyek secara keseluruhan; (v) penyusunan rencana pemantauan proyek; (vi) identifikasi analisis perkiraan biaya dan resiko; (vi) Penyusunan dokumen PIM (*Project Implementation Manual*) pelaksanaan kegiatan; (vii) Pemetaan *Stakeholder* dan *Institutional Arrangement*; dan (viii) Kajian Pendalaman Komponen SCIP.
- 2.1.4. **Knowledge Sharing**, Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan persiapan pelaksanaan hibah SCIP sehingga Pemerintah Daerah lebih siap dalam melaksanakan proyek SCIP, termasuk di dalamnya sosialisasi hasil kajian yang dilakukan selama pelaksanaan PPG. Adapun komponen kegiatan meliputi: (i) Pelaksanaan *National Workshop* dengan melibatkan K/L, mitra pembangunan dan/atau perguruan tinggi/lembaga peneliti; dan (ii) Pelaksanaan *local workshop* di 5 kota. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan dilakukan secara daring menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Konsultan harus menyiapkan rincian anggaran biaya beserta untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup kegiatan dan seluruh kegiatan tambahan yang dianggap perlu untuk menghasilkan produk kajian yang berkualitas. Konsultan dapat mengusulkan amandemen dan alternatif dalam proposal.

## 2.2. KELUARAN KEGIATAN

Keluaran untuk paket jasa konsultansi ini meliputi dan tidak terbatas pada:

Dokumen pengadaan hibah utama SCIP sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.1.

1. Rencana Pengelolaan Keuangan dan Investasi Proyek SCIP sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.1. Dokumen *Project Procurement Strategy for Development* (PPSD) sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.1.
2. Dokumen *Environmental and Social Safeguard* sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.2.
3. Dokumen *Project Design Document* (PDD) sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.3
4. Dokumen *Project Implementation Manual* (PIM) sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.3.
5. Kegiatan *National Workshop* dan *Local Workshop* sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.4
6. Materi serta laporan pelaksanaan *Knowledge Sharing* (*National Workshop* dan *Local Workshop*) sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.4

## 2.3. PELAPORAN

Laporan hasil Jasa Konsultansi Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia dibagi menjadi sebagai berikut:

- 2.3.1. Laporan Pendahuluan, yang sudah mendapat persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK dikirimkan selambatnya pada akhir bulan ke-1, dicetak berwarna dalam kertas A4 dan Peta dalam kertas A3 (jika ada) dengan rangkap 5 (lima) exemplar, dilengkapi dengan bentuk digital (*soft copy*) yang dapat di edit, terdiri atas: (a) profil wilayah studi, temuan awal, permasalahan yang memerlukan klarifikasi, jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan; (b) usulan metode, teknik, dan alat pengumpulan data dan analisis yang akan dilakukan; (c) rencana kerja konsultan, input dan output yang akan dihasilkan.
- 2.3.2. Laporan Antara, yang sudah mendapat persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK dikirimkan selambatnya pada akhir bulan ke-4, dicetak berwarna dalam kertas A4 dan Peta dalam kertas A3 (jika ada) dengan rangkap 5 (lima) exemplar, dilengkapi dengan bentuk digital (*soft copy*) yang dapat di edit, terdiri atas: (a) hasil pengumpulan data; (b) rancangan awal dokumen dan peniaian pengamanan sesuai 2.1.2 dan rancangan awal PDD dan PIM sesuai 2.1.3; (c) hasil pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing* tahap I; (d) hasil *benchmarking* praktik baik; (e) permasalahan dan kendala yang dihadapi serta tindak lanjut yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya, disertai dengan basis data spasial dan tabular yang dihasilkan dalam proses analisis;
- 2.3.3. Rancangan Laporan Akhir, dikirimkan selambatnya pada akhir bulan ke-7, yang telah memasukkan (a) rancangan akhir dokumen PPSD, *environmental and social safeguard*, PDD, dan PIM yang lebih lengkap; (b) hasil umpan balik dari kegiatan *knowledge sharing* tahap II; serta (c) rancangan ringkasan eksekutif untuk mempermudah mengerti secara cepat isi laporan dan untuk pengambilan keputusan.

Ringkasan Eksekutif harus dilengkapi dengan nomor halaman di Rancangan Laporan Akhir.

2.3.4. Laporan Akhir: Laporan Final yang sudah mendapat persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK dikirimkan selambatnya pada bulan ke-10, dicetak berwarna dalam kertas A4 dan Peta dalam kertas A3 (jika ada) dengan rangkap 5 (lima) exemplar, dilengkapi dengan bentuk digital (*soft copy*) yang dapat di edit, terdiri atas:

- a. Laporan Hasil Kajian;
- b. Dokumen akhir pengadaan hibah utama SCIP;
- c. Dokumen akhir pengelolaan keuangan dan investasi proyek SCIP;
- d. Dokumen akhir PPSD;
- e. Dokumen akhir Dukungan Penyusunan Dokumen dan Penilaian Pengamanan;
- f. Dokumen akhir *Environmental and Social Safeguard*;
- g. Dokumen akhir PDD;
- h. Dokumen akhir PIM;
- i. Laporan pelaksanaan *knowledge sharing*
- j. Ringkasan Eksekutif dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- k. Presentasi dalam bentuk ppt dan multimedia untuk memvisualisasikan strategi pembangunan daerah dan penguatan kerangka pelaksanaan pembangunan daerah menjadi lebih mudah dipahami. Substansi, animasi, serta desain ppt dan multimedia agar didiskusikan terlebih dahulu dengan pemberi kerja;
- l. Basis data tabular dan spasial yang dihasilkan;
- m. Instrumen penelitian dan dokumen pendukung lainnya yang dihasilkan selama proses penyusunan kajian.

2.3.5. Setiap laporan beserta data diserahkan juga dalam bentuk softcopy termasuk data mentah (*raw data*), data olahan, baik dalam bentuk data tabular maupun data spasial dengan memperhatikan kompatibilitas format data

2.3.6. Seluruh laporan kajian ditulis menggunakan ketentuan bahasa yang dipersyaratkan serta Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2.3.7. Konsultan wajib menjaga kerahasiaan data, laporan serta hasil kegiatan ini yaitu tidak menyebarkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Pembangunan Daerah dan tidak menggunakan laporan beserta data untuk kepentingan pihak lain

## **2.4. JADWAL PEKERJAAN**

2.4.1. Kegiatan dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung dari masa penandatanganan kontrak.

2.4.2. Konsultan harus mempersiapkan jadwal rinci dari kegiatan sebagai bagian dari proposal teknis, termasuk kegiatan tambahan yang dianggap perlu untuk tujuan studi

yang diusulkan oleh Konsultan sesuai dengan pemahamannya tentang keluaran kajian yang harus dihasilkan.

- 2.4.3. Garis besar dari jadwal pelaksanaan proyek untuk berbagai kegiatan yang ditugaskan dalam ruang lingkup Jasa Konsultansi disediakan di bawah ini sebagai panduan. Konsultan dapat mengajukan perbaikan rincian jadwal kegiatan sebagai bagian dari proposal teknis, termasuk kegiatan tambahan yang diperlukan sesuai dengan pemahaman Konsultan tentang kajian yang harus dihasilkan. Khusus untuk meningkatkan partisipasi publik dan untuk memperkaya materi yang diperlukan, dapat diusulkan pertemuan dengan pemangku kepentingan di pusat dan di daerah.

Tabel 1. Usulan Garis Besar Jadwal Pelaksanaan Kajian

Kegiatan	2021	2022								
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mobilisasi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung</b>										
1. <i>Team Leader</i>										
2. Tenaga Ahli Perencanaan Perkotaan										
3. Tenaga Ahli Lingkungan Hidup										
4. Tenaga Ahli Pengadaan										
5. Tenaga Ahli Perlindungan Sosial										
5. Tenaga Ahli Kebijakan Publik										
6. Tenaga Ahli Muda Pembiayaan Perkotaan										
7. Tenaga Ahli Muda Lingkungan (GIS)										
8. Tenaga Ahli Muda Komunikasi Publik										
9. Tenaga Administrasi										
<b>Koordinasi Pelaksanaan Hibah dan Jasa Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Hibah (PPG) Fasilitasi Lingkungan Global (GEF): Program Dampak Kota</b>										
1. Penyiapan Rencana Pengadaan dan Strategi Pengadaan Proyek untuk Pembangunan										
a. Identifikasi paket pengadaan										
b. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan keuangan dan investasi proyek										
c. Penyiapan dan penyusunan dokumen PPSD										
d. Penyiapan dokumen pengadaan meliputi dan tidak terbatas pada TOR, REOI, RFP, dan dokumen paket Hibah SCIP										
2. Dukungan Penyusunan dan Penilaian Pengamanan										
a. Identifikasi nilai lingkungan dan isu sosial pengembangan kota										
b. Penyusunan dokumen <i>Environmental and Social Safeguard</i> berdasarkan ketentuan berlaku										
3. Penyusunan Dokumen Desain Proyek ( <i>Project Design Document - PDD</i> ) dan Pedoman										
a. <i>City Level Assessment</i>										
b. Identifikasi rencana tata ruang terintegrasi dengan pertimbangan lingkungan										
c. Identifikasi skema pembiayaan inovatif terintegrasi										
d. Identifikasi pengaturan implementasi kegiatan dan desain proyek secara keseluruhan										
e. Identifikasi analisis perkiraan biaya dan resiko										
f. Pemetaan <i>Stakeholder</i> dan <i>Institutional Arrangement</i>										
g. Penyusunan rencana pemantauan proyek										
h. Penyusunan dokumen PIM										
i. Kajian pendalaman komponen SCIP										
4. <i>Knowledge Sharing</i> bersama Pemerintah Kota										
a. Pelaksanaan <i>national workshop</i>										
b. Pelaksanaan <i>local workshop</i> di 5 (lima) kota terpilih										

**Catatan:**

- 1) Presentasi ke Kementerian PPN/Bappenas pada akhir setiap tahapan kegiatan
- 2) Konsultan dapat mengajukan perbaikan jadwal pelaksanaan proyek dalam proposal yang disampaikan sebagai pertimbangan Kementerian PPN/Bappenas



**BAGIAN 3:**  
**METODE PENGADAAN**

### **3. BAGIAN 3: METODE PENGADAAN**

#### **3.1. MEKANISME PENGADAAN**

- 3.1.1. Proses pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha sesuai dengan Regulasi Pengadaan Bank Dunia - "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (November 2020) ("Procurement Regulations") dengan metode Consultant's Qualifications - based Selection (CQS).
- 3.1.2. Mekanisme pembayaran dari Kementerian PPN/Bappenas kepada konsultan dilakukan melalui mekanisme lumpsum dan akan dibayarkan dalam tiga tahap mengikuti termin pelaporan, dimana pembayaran tahap I akan dilakukan setelah konsultan menyerahkan Laporan Pendahuluan, pembayaran tahap II akan dilakukan setelah konsultan menyerahkan Laporan Antara, sedangkan pembayaran tahap III akan dilakukan setelah konsultan menyerahkan Laporan Akhir.

#### **3.2. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA**

- 3.2.1. Untuk melaksanakan komponen kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, penyedia jasa konsultansi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Memiliki izin usaha sebagai penyedia jasa konsultansi manajemen (KLBI 7020);
  - b. Merupakan badan usaha nasional yang memiliki spesifikasi jasa konsultasi dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Nomor Induk Berusaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (NIB KBLI) Konsultan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
  - c. Merupakan perusahaan yang memiliki izin usaha di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir (tahun 2020).
  - e. Memiliki pengalaman:
    - Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
    - Pekerjaan yang serupa berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan bukti kontrak/referensi dari pengguna yang dilengkapi dengan nilai pekerjaan;



- Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir paling kurang sama dengan 80% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
- f. Memiliki sumber daya manusia:
- Tenaga ahli berpengalaman dalam menyusun kebijakan nasional perkotaan dan perencanaan pembangunan perkotaan dengan Pemerintah;
  - Tenaga manajerial; serta
  - Tenaga teknis (jika diperlukan).
- g. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan)
- h. Konsultan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan seperti yang dijelaskan dalam KAK dan harus menyediakan ruang kantor, fasilitas, staf, dan peralatan yang akan memungkinkannya untuk melaksanakan tugas secara tepat waktu.

### 3.3. KEBUTUHAN PERSONIL

3.3.1. Pelaksana kegiatan ini merupakan perusahaan jasa konsultan yang bertugas untuk membantu Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelesaian rangkaian kegiatan Jasa Konsultansi Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia. Konsultan wajib untuk melengkapi personil tim yang dapat mengerjakan ruang lingkup tersebut di atas dengan kualifikasi tenaga ahli pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2 Kualifikasi Tenaga Ahli**

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
<i>Team Leader</i> (Ahli Pengembangan Wilayah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang Perencanaan Wilayah Kota/Ilmu Lingkungan/Teknik Lingkungan atau bidang yang relevan dengan pembangunan perkotaan berkelanjutan.</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 10 tahun dalam bidang perencanaan kota berkelanjutan yang dibuktikan dengan surat referensi pemberi kerja sebelumnya</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai <i>team leader</i> dalam bidang perencanaan/ pembangunan kota.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan wilayah dan kota/teknik lingkungan (ahli madya) atau publikasi dalam bidang tersebut yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> </ul>	10 Bulan

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara profesional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	
Tenaga Ahli Perencanaan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang perencanaan kota atau bidang yang relevan dengan pembangunan perkotaan berkelanjutan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 7 tahun di bidang perencanaan kota, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan kota (ahli madya) atau publikasi dalam bidang tersebut yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara profesional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Ahli Perlindungan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang teknik lingkungan/ilmu lingkungan/kehutanan/ teknik sipil dan lingkungan/arsitektur lanskap atau bidang yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 7 tahun dalam pekerjaan terkait pengelolaan lingkungan/ pengelolaan sampah dan limbah/perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> </ul>	10 Bulan

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang teknik lingkungan/ilmu lingkungan/kehutanan/ teknik sipil (ahli madya) atau publikasi dalam bidang tersebut yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Memiliki kemampuan analisis dan proyeksi terhadap kerusakan lingkungan di masa mendatang yang dibuktikan dengan hasil kajian sebelumnya (disampaikan dalam bentuk tautan/<i>softcopy</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara profesional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	
Tenaga Ahli Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang ekonomi/bisnis atau bidang yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memiliki pengalaman minimal 7 tahun di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang ekonomi/bisnis (ahli madya) atau publikasi dalam bidangnya yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara profesional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
Tenaga Ahli Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang sosiologi/sosial ekonomi/antropologi/ilmu budaya atau bidang yang relevan dengan dampak sosial.</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 7 tahun dalam pekerjaan terkait kajian sosial, budaya, humaniora yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Memiliki kemampuan analisis dan pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang dibuktikan dengan hasil kajian sebelumnya (disampaikan dalam bentuk tautan/<i>softcopy</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara profesional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Ahli Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang kebijakan publik/studi pembangunan atau bidang yang relevan dengan pengelolaan proyek pembangunan berkelanjutan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 7 tahun di bidang kebijakan publik, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang kebijakan publik/studi pembangunan (ahli madya) atau publikasi dalam bidangnya yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara profesional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
Tenaga Ahli Muda Pembiayaan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang ekonomi/studi pembangunan atau bidang yang relevan dengan keuangan/pembiayaan perkotaan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang pembiayaan pembangunan (diutamakan pembiayaan pembangunan perkotaan) yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara profesional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Ahli Muda Lingkungan (GIS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang teknik lingkungan/ilmu lingkungan/kehutanan atau bidang yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam program/proyek-proyek pembangunan terutama pembangunan perkotaan/pengelolaan lingkungan/pengelolaan sampah dan limbah/ perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Menguasai dan mampu mengoperasikan aplikasi peretakan (ArcGIS, QGIS, dll) dan memiliki kemampuan analisis spasial.</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara profesional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Ahli Muda Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang komunikasi/kebijakan publik atau bidang yang relevan dengan perencanaan partisipatif/partisipasi publik</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang advokasi komunikasi publik, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> </ul>	10 Bulan

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	
Tenaga Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal Diploma III di bidang administrasi keuangan/akuntansi/ekonomi/manajemen</li> <li>● Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki kemampuan dalam mengolah data keuangan dan menyusun laporan keuangan.</li> <li>● Menguasai dan terampil dalam mengoperasikan komputer, minimal <i>Microsoft Office (Word dan Excel)</i></li> </ul>	10 Bulan

### 3.4. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

- 3.4.1. Metode pengumpulan data dilakukan secara primer (survei lapangan/FGD/diskusi publik/lokakarya) dan sekunder (data tabular dan spasial kementerian-lembaga atau pemerintah daerah/studi literatur/studi *benchmarking*).
- 3.4.2. Metode pengumpulan data dan analisis data spasial maupun tabular dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan standar/ketentuan yang berlaku.
- 3.4.3. Pemetaan dan penyusunan basis data dilakukan atas seluruh informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan perangkat lunak yang tepat, program dan alat untuk memastikan hasil pemetaan dan penyusunan basis data digital dapat menjamin keberlanjutan analisis di masa depan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.
- 3.4.4. Metode analisis data tabular dilakukan dengan menggunakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta K/L/D wali data atau dari basis data tabular yang dimiliki oleh konsultan atau dengan akuisisi data tabular lainnya yang handal dan tersedia di pasar. Untuk data yang tidak tersedia, digunakan metode pengumpulan data primer.

- 3.4.5. Metode analisis spasial dilakukan dengan menggunakan peta dasar dan peta tematik yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) serta K/L/D wali data atau dari basis data spasial yang dimiliki oleh konsultan atau dengan akuisisi data spasial lainnya yang handal dan tersedia di pasar. Untuk data yang tidak tersedia, digunakan metode pengumpulan data primer.
- 3.4.6. Konsultan dapat mengusulkan metode tambahan untuk memastikan kualitas keluaran kajian. Metode pengumpulan dan analisis data yang disepakati dengan Tim Internal akan digunakan dalam laporan antara dan akhir Konsultan.
- 3.4.7. Seluruh aspek metode kajian harus secara jelas dijabarkan termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Seluruh metode dan teknik yang akan digunakan;
  - b. Teori yang akan dibangun beserta asumsi yang akan digunakan;
  - c. Teknik analisis dan pemetaan, utamanya untuk penentuan desain proyek dan pemetaan kondisi spasial dan aspasial dari kota intervensi .
- 3.4.8. Basis data spasial dan tabular yang akan diserahkan di akhir kegiatan penyusunan kajian harus dilengkapi dengan instruksi yang memungkinkan pemutakhiran data, serta pemantauan dan evaluasi implementasi kegiatan.

### **3.5. KETENTUAN PEMETAAN KOMPILASI BASIS DATA**

- 3.5.1. Untuk kebutuhan pemetaan dan kompilasi basis data dari seluruh informasi yang terkumpul, Bappenas mengharuskan Penyedia Jasa untuk menggunakan perangkat lunak, program, dan alat yang tepat untuk memastikan pemetaan dan analisis digital dapat dilakukan di masa depan dengan menggunakan basis data yang ada. Basis data ini harus dapat digunakan di masa depan untuk pengelolaan dan perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan daerah di Indonesia.
- 3.5.2. Basis data meliputi seluruh data spasial dan tabular yang terkumpul pada saat proses mempersiapkan kajian dengan memperhatikan juga potensi data yang akan tersedia di masa depan.
- 3.5.3. Seluruh perangkat lunak dan format data diatur oleh wali data di Indonesia dengan memperhatikan kompatibilitas antarperangkat.
- 3.5.4. Untuk data tabular, format file **.dbf** harus dapat digunakan dengan *MS Excel* dan *MS Access*. Bappenas memiliki akses ke data tematik yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial dan data mikro yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dalam format digital.

**4. BAGIAN 4: PENUTUP**

Demikian KAK ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, September 2021

Mengetahui,  
PPK PROGRAM PERENCANAAN  
NASIONAL II,



ZULFAKAR, S. Kom, ME  
NIP. 19691124 199403 1 004





**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Proyek Persiapan  
Hibah Fasilitas Lingkungan Global – Program Dampak  
Kota Berkelanjutan di Indonesia**

**TAHUN ANGGARAN 2021 - 2022**

**DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAERAH**

**JAKARTA, 2021**

## DAFTAR ISI

### 1. BAGIAN 1: PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Rencana Anggaran Biaya

### 2. BAGIAN 2: RUANG LINGKUP JASA KONSULTASI

- 2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
  - 2.1.1. Pengumpulan Data
  - 2.1.2. Pemetaan dan Penyusunan Basis Data
  - 2.1.3. Kajian dan Analisis
  - 2.1.4. *Benchmarking*
  - 2.1.5. Partisipasi Publik
  - 2.1.6. Rekomendasi Implementasi
- 2.2 Keluaran Kegiatan
- 2.3 Pelaporan
- 2.4 Jadwal Pekerjaan

### 3. BAGIAN 3: METODE PENGADAAN

- 3.1 Mekanisme Pengadaan
- 3.2 Kualifikasi Penyedia Badan Usaha Penyedia Jasa
- 3.3 Kebutuhan Personil
- 3.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data
- 3.5 Ketentuan Pemetaan dan Kompilasi Basis Data

### 4. BAGIAN 4: PENUTUP

### 5. BAGIAN 5: LAMPIRAN

**BAGIAN 1:**  
**PENDAHULUAN**

## 1. BAGIAN 1: PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

- 1.1.1. Saat ini di 53% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan diperkirakan akan mencapai 70% pada tahun 2045. Penurunan keanekaragaman hayati, perluasan kota, perencanaan yang tidak terintegrasi, dan degradasi lingkungan termasuk pola pembangunan yang tinggi karbon berimplikasi pada kualitas hidup jutaan orang Indonesia.
- 1.1.2. Program Dampak Kota Berkelanjutan Indonesia (*Sustainable Cities Impact Program/SCIP*) dari Fasilitas Lingkungan Global (*Global Environment Facility/GEF*) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kota dalam menyiapkan rencana pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi dan prioritas *capital investment planning* dengan mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati sesuai dengan Kebijakan Perkotaan Nasional, Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN 2020-2024 (Rencana Jangka Menengah 5 Tahun).
- 1.1.3. SCIP juga diarahkan untuk memberikan dampak (*impact*) perubahan perilaku pelaku pembangunan dalam berpikir secara holistik dan berkesinambungan dalam membangun kota yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara seimbang.
- 1.1.4. Pelaksanaan proyek akan diintegrasikan dengan program-program *sustainable development* yang sedang berjalan seperti *National Urban Development Project* (NUDP) dan *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) yang memiliki tujuan akhir yang sama yakni ke arah *sustainable city* dengan menitikberatkan pembangunan rendah emisi dan rendah karbon. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan GEF ini diharapkan dapat mendukung proyek-proyek sebelumnya dalam menemukan pendekatan dan indikator kota berkelanjutan berdasarkan *lesson learned* dari kota-kota percontohan.
- 1.1.5. Selain itu, integrasi kegiatan GEF dan program program yang telah ada diharapkan dapat meningkatkan dampak dari program yang akan semakin besar dan berperan sebagai pengungkit (*leverage*) bagi penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan kota di Indonesia.
- 1.1.6. Kegiatan SCIP akan dilaksanakan sedikitnya pada 5 kota pilot yang telah disesuaikan dengan kriteria pemilihan kota berdasarkan unsur lingkungan, ke 5 kota tersebut terdiri dari : Palembang, DKI Jakarta, Semarang, Balikpapan, dan Bitung
- 1.1.7. Untuk mempersiapkan pelaksanaan hibah SCIP yang akan dilaksanakan dengan 5 kota pilot di atas dalam waktu 5 tahun dibutuhkan persiapan dalam rangka peningkatan kapasitas instansi pelaksana dan persiapan administrasi yang diperlukan dalam implementasi Proyek SCIP. Atas dasar ini pada tahun 2020-2021 dilaksanakan *Preparation of Propose Indonesia SCIP* melalui pendanaan *Project Preparation Grant* (PPG).

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1.2.1. Landasan hukum yang diacu dalam pelaksanaan proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia, antara lain:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pasal 64 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Dalam hal ini mengacu ke perjanjian hibah luar negeri yang mengatur proses pengadaan barang/jasa mengikuti aturan dari regulasi pengadaan Bank Dunia yaitu “*World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers*” (November 2020).
- b. Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri *Global Environment Facility (GEF) Grant TF0B5661: Project Preparation Grant (PPG) for the Preparation of Proposed Indonesia Sustainable Cities Impact Project (SCIP)*, dengan Nomor Registrasi Hibah Luar Negeri 2Y3ADTQA.

## **1.3. SASARAN**

1.3.1. Sasaran Jasa Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan hibah Program Dampak Kota Berkelanjutan (SCIP) yang dilaksanakan pada 5 kota untuk memberikan dampak (*impact*) perubahan perilaku pelaku pembangunan dalam berpikir secara holistik dan berkesinambungan dalam membangun kota yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan secara seimbang.

## **1.4. TUJUAN**

1.4.1. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk: (a) Mempersiapkan dokumen pengadaan pelaksanaan hibah Program Dampak Kota Berkelanjutan, (b) Analisis teknis awal, analisis risiko, analisis pembiayaan pada 5 kota terpilih; dan (c) Konsultasi dan sosialisasi kegiatan di kota terpilih bersama dengan pemangku kepentingan terkait.

## **1.5. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Kegiatan akan dibiayai melalui sumber pendanaan DIPA Direktorat Pembangunan Daerah yang berasal dari Hibah Luar Negeri *Global Environment Facility (GEF) Grant TF0B5661: Project Preparation Grant (PPG) for the Preparation of Proposed Indonesia Sustainable Cities Impact Project (SCIP)*, dengan Nomor Registrasi Hibah Luar Negeri 2Y3ADTQA, untuk periode tahun anggaran 2021–2022. Hibah ini tercatat sebagai hibah terencana dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) 2020 dengan penyaluran hibah melalui rekening khusus yang diterima sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Pembangunan Daerah di bawah PPK Program PPN II Kedeputian Bidang Pengembangan Regional.

**BAGIAN 2:**  
**RUANG LINGKUP JASA KONSULTANSI**

## 2. BAGIAN 2: RUANG LINGKUP JASA KONSULTANSI

### 2.1. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Konsultan Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia melakukan kajian dan beberapa kegiatan untuk memenuhi tujuan yang telah disebut dalam Latar Belakang pada bagian 1. Ruang lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan, namun tidak terbatas pada:

- 2.1.1. **Penyiapan Rencana Pengadaan dan Strategi Pengadaan Proyek Untuk Pembangunan (PPSD)**, Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan lelang paket Hibah SCIP. Adapun komponen kegiatan mencakup (i) Penyiapan dokumen pengadaan meliputi dan tidak terbatas pada *Term of Reference (TOR)*, *Request for Expressions of Interest (REOI)*, *Request for Proposal (RFP)*, serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam proses pengadaan paket Hibah SCIP sesuai dengan ketentuan berlaku; (ii) Identifikasi paket pengadaan; (iii) Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan keuangan dan investasi proyek; dan (iv) Penyiapan dan penyusunan dokumen *Project Procurement Strategy for Development (PPSD)*.
- 2.1.2. **Dukungan Penyusunan Dokumen dan Penilaian Pengamanan**, Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan paket hibah SCIP memberikan dampak positif secara lingkungan dan sosial. Adapun komponen kegiatan mencakup (i) identifikasi nilai lingkungan dan isu sosial pengembangan kota; dan (ii) Penyusunan dokumen *Environmental and social safeguard* berdasarkan ketentuan berlaku (*donor guideline*).
- 2.1.3. **Penyusunan Dokumen Desain Proyek (PDD) dan Pedoman Operasional Proyek (PIM)**, Kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan proyek secara mendetail baik dari segi perencanaan kegiatan maupun pengelolaan proyek. Adapun komponen kegiatan mencakup: (i) *City Level Assessment* ; (ii) Identifikasi rencana tata ruang terintegrasi dengan pertimbangan lingkungan; (iii) Identifikasi skema pembiayaan inovatif terintegrasi; (iv) Identifikasi pengaturan implementasi kegiatan dan desain proyek secara keseluruhan; (v) penyusunan rencana pemantauan proyek; (vi) identifikasi analisis perkiraan biaya dan resiko; (vi) Penyusunan dokumen PIM (*Project Implementation Manual*) pelaksanaan kegiatan; (vii) Pemetaan *Stakeholder* dan *Institutional Arrangement*; dan (viii) Kajian Pendalaman Komponen SCIP.
- 2.1.4. **Knowledge Sharing**, Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan persiapan pelaksanaan hibah SCIP sehingga Pemerintah Daerah lebih siap dalam melaksanakan proyek SCIP, termasuk di dalamnya sosialisasi hasil kajian yang dilakukan selama pelaksanaan PPG. Adapun komponen kegiatan meliputi: (i) Pelaksanaan *National Workshop* dengan melibatkan K/L, mitra pembangunan dan/atau perguruan tinggi/lembaga peneliti; dan (ii) Pelaksanaan *local workshop* di 5 kota. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dan dilakukan secara daring menyesuaikan dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

Konsultan harus menyiapkan rincian anggaran biaya beserta untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam ruang lingkup kegiatan dan seluruh kegiatan tambahan yang dianggap perlu untuk menghasilkan produk kajian yang berkualitas. Konsultan dapat mengusulkan amandemen dan alternatif dalam proposal.

## 2.2. KELUARAN KEGIATAN

Keluaran untuk paket jasa konsultansi ini meliputi dan tidak terbatas pada:

Dokumen pengadaan hibah utama SCIP sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.1.

1. Rencana Pengelolaan Keuangan dan Investasi Proyek SCIP sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.1. Dokumen *Project Procurement Strategy for Development* (PPSD) sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.1.
2. Dokumen *Environmental and Social Safeguard* sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.2.
3. Dokumen *Project Design Document* (PDD) sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.3
4. Dokumen *Project Implementation Manual* (PIM) sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.3.
5. Kegiatan *National Workshop* dan *Local Workshop* sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.4
6. Materi serta laporan pelaksanaan *Knowledge Sharing* (*National Workshop* dan *Local Workshop*) sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup 2.1.4

## 2.3. PELAPORAN

Laporan hasil Jasa Konsultansi Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia dibagi menjadi sebagai berikut:

- 2.3.1. Laporan Pendahuluan, yang sudah mendapat persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK dikirimkan selambatnya pada akhir bulan ke-1, dicetak berwarna dalam kertas A4 dan Peta dalam kertas A3 (jika ada) dengan rangkap 5 (lima) exemplar, dilengkapi dengan bentuk digital (*soft copy*) yang dapat di edit, terdiri atas: (a) profil wilayah studi, temuan awal, permasalahan yang memerlukan klarifikasi, jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan; (b) usulan metode, teknik, dan alat pengumpulan data dan analisis yang akan dilakukan; (c) rencana kerja konsultan, input dan output yang akan dihasilkan.
- 2.3.2. Laporan Antara, yang sudah mendapat persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK dikirimkan selambatnya pada akhir bulan ke-4, dicetak berwarna dalam kertas A4 dan Peta dalam kertas A3 (jika ada) dengan rangkap 5 (lima) exemplar, dilengkapi dengan bentuk digital (*soft copy*) yang dapat di edit, terdiri atas: (a) hasil pengumpulan data; (b) rancangan awal dokumen dan peniaian pengamanan sesuai 2.1.2 dan rancangan awal PDD dan PIM sesuai 2.1.3; (c) hasil pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing* tahap I; (d) hasil *benchmarking* praktik baik; (e) permasalahan dan kendala yang dihadapi serta tindak lanjut yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya, disertai dengan basis data spasial dan tabular yang dihasilkan dalam proses analisis;
- 2.3.3. Rancangan Laporan Akhir, dikirimkan selambatnya pada akhir bulan ke-7, yang telah memasukkan (a) rancangan akhir dokumen PPSD, *environmental and social safeguard*, PDD, dan PIM yang lebih lengkap; (b) hasil umpan balik dari kegiatan *knowledge sharing* tahap II; serta (c) rancangan ringkasan eksekutif untuk mempermudah mengerti secara cepat isi laporan dan untuk pengambilan keputusan.



Ringkasan Eksekutif harus dilengkapi dengan nomor halaman di Rancangan Laporan Akhir.

- 2.3.4. Laporan Akhir: Laporan Final yang sudah mendapat persetujuan dari unit kerja penanggung jawab substansi dan PPK dikirimkan selambatnya pada bulan ke-10, dicetak berwarna dalam kertas A4 dan Peta dalam kertas A3 (jika ada) dengan rangkap 5 (lima) exemplar, dilengkapi dengan bentuk digital (*soft copy*) yang dapat di edit, terdiri atas:
- a. Laporan Hasil Kajian;
  - b. Dokumen akhir pengadaan hibah utama SCIP;
  - c. Dokumen akhir pengelolaan keuangan dan investasi proyek SCIP;
  - d. Dokumen akhir PPSD;
  - e. Dokumen akhir Dukungan Penyusunan Dokumen dan Penilaian Pengamanan;
  - f. Dokumen akhir *Environmental and Social Safeguard*;
  - g. Dokumen akhir PDD;
  - h. Dokumen akhir PIM;
  - i. Laporan pelaksanaan *knowledge sharing*
  - j. Ringkasan Eksekutif dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
  - k. Presentasi dalam bentuk ppt dan multimedia untuk memvisualisasikan strategi pembangunan daerah dan penguatan kerangka pelaksanaan pembangunan daerah menjadi lebih mudah dipahami. Substansi, animasi, serta desain ppt dan multimedia agar didiskusikan terlebih dahulu dengan pemberi kerja;
  - l. Basis data tabular dan spasial yang dihasilkan;
  - m. Instrumen penelitian dan dokumen pendukung lainnya yang dihasilkan selama proses penyusunan kajian.
- 2.3.5. Setiap laporan beserta data diserahkan juga dalam bentuk softcopy termasuk data mentah (*raw data*), data olahan, baik dalam bentuk data tabular maupun data spasial dengan memperhatikan kompatibilitas format data
- 2.3.6. Seluruh laporan kajian ditulis menggunakan ketentuan bahasa yang dipersyaratkan serta Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2.3.7. Konsultan wajib menjaga kerahasiaan data, laporan serta hasil kegiatan ini yaitu tidak menyebarkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Pembangunan Daerah dan tidak menggunakan laporan beserta data untuk kepentingan pihak lain

## **2.4. JADWAL PEKERJAAN**

- 2.4.1. Kegiatan dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung dari masa penandatanganan kontrak.
- 2.4.2. Konsultan harus mempersiapkan jadwal rinci dari kegiatan sebagai bagian dari proposal teknis, termasuk kegiatan tambahan yang dianggap perlu untuk tujuan studi

yang diusulkan oleh Konsultan sesuai dengan pemahamannya tentang keluaran kajian yang harus dihasilkan.

- 2.4.3. Garis besar dari jadwal pelaksanaan proyek untuk berbagai kegiatan yang ditugaskan dalam ruang lingkup Jasa Konsultansi disediakan di bawah ini sebagai panduan. Konsultan dapat mengajukan perbaikan rincian jadwal kegiatan sebagai bagian dari proposal teknis, termasuk kegiatan tambahan yang diperlukan sesuai dengan pemahaman Konsultan tentang kajian yang harus dihasilkan. Khusus untuk meningkatkan partisipasi publik dan untuk memperkaya materi yang diperlukan, dapat diusulkan pertemuan dengan pemangku kepentingan di pusat dan di daerah.

Tabel 1. Usulan Garis Besar Jadwal Pelaksanaan Kajian

Kegiatan	2021	2022								
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Mobilisasi Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung</b>										
1. <i>Team Leader</i>										
2. Tenaga Ahli Perencanaan Perkotaan										
3. Tenaga Ahli Lingkungan Hidup										
4. Tenaga Ahli Pengadaan										
5. Tenaga Ahli Perlindungan Sosial										
5. Tenaga Ahli Kebijakan Publik										
6. Tenaga Ahli Muda Pembiayaan Perkotaan										
7. Tenaga Ahli Muda Lingkungan (GIS)										
8. Tenaga Ahli Muda Komunikasi Publik										
9. Tenaga Administrasi										
<b>Koordinasi Pelaksanaan Hibah dan Jasa Konsultasi Persiapan Pelaksanaan Hibah (PPG) Fasilitasi Lingkungan Global (GEF): Program Dampak Kota</b>										
1. Penyiapan Rencana Pengadaan dan Strategi Pengadaan Proyek untuk Pembangunan										
a. Identifikasi paket pengadaan										
b. Penyiapan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan keuangan dan investasi proyek										
c. Penyiapan dan penyusunan dokumen PPSD										
d. Penyiapan dokumen pengadaan meliputi dan tidak terbatas pada TOR, REOI, RFP, dan dokumen paket Hibah SCIP										
2. Dukungan Penyusunan dan Penilaian Pengamanan										
a. Identifikasi nilai lingkungan dan isu sosial pengembangan kota										
b. Penyusunan dokumen <i>Environmental and Social Safeguard</i> berdasarkan ketentuan berlaku										
3. Penyusunan Dokumen Desain Proyek ( <i>Project Design Document - PDD</i> ) dan Pedoman										
a. <i>City Level Assessment</i>										
b. Identifikasi rencana tata ruang terintegrasi dengan pertimbangan lingkungan										
c. Identifikasi skema pembiayaan inovatif terintegrasi										
d. Identifikasi pengaturan implementasi kegiatan dan desain proyek secara keseluruhan										
e. Identifikasi analisis perkiraan biaya dan resiko										
f. Pemetaan <i>Stakeholder</i> dan <i>Institutional Arrangement</i>										
g. Penyusunan rencana pemantauan proyek										
h. Penyusunan dokumen PIM										
i. Kajian pendalaman komponen SCIP										
4. <i>Knowledge Sharing</i> bersama Pemerintah Kota										
a. Pelaksanaan <i>national workshop</i>										
b. Pelaksanaan <i>local workshop</i> di 5 (lima) kota terpilih										

**Catatan:**

- 1) Presentasi ke Kementerian PPN/Bappenas pada akhir setiap tahapan kegiatan
- 2) Konsultan dapat mengajukan perbaikan jadwal pelaksanaan proyek dalam proposal yang disampaikan sebagai pertimbangan Kementerian PPN/Bappenas

**BAGIAN 3:**  
**METODE PENGADAAN**

### **3. BAGIAN 3: METODE PENGADAAN**

#### **3.1. MEKANISME PENGADAAN**

- 3.1.1. Proses pengadaan dilaksanakan melalui mekanisme Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha sesuai dengan Regulasi Pengadaan Bank Dunia - "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (November 2020) ("Procurement Regulations") dengan metode Consultant's Qualifications - based Selection (CQS).
- 3.1.2. Mekanisme pembayaran dari Kementerian PPN/Bappenas kepada konsultan dilakukan melalui mekanisme lumpsum dan akan dibayarkan dalam tiga tahap mengikuti termin pelaporan, dimana pembayaran tahap I akan dilakukan setelah konsultan menyerahkan Laporan Pendahuluan, pembayaran tahap II akan dilakukan setelah konsultan menyerahkan Laporan Antara, sedangkan pembayaran tahap III akan dilakukan setelah konsultan menyerahkan Laporan Akhir.

#### **3.2. KUALIFIKASI PENYEDIA JASA**

- 3.2.1. Untuk melaksanakan komponen kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, penyedia jasa konsultansi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Memiliki izin usaha sebagai penyedia jasa konsultansi manajemen (KLBI 7020);
  - b. Merupakan badan usaha nasional yang memiliki spesifikasi jasa konsultasi dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Nomor Induk Berusaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (NIB KBLI) Konsultan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
  - c. Merupakan perusahaan yang memiliki izin usaha di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir (tahun 2020).
  - e. Memiliki pengalaman:
    - Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
    - Pekerjaan yang serupa berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan bukti kontrak/referensi dari pengguna yang dilengkapi dengan nilai pekerjaan;
    - Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir paling kurang sama dengan 80% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.

- f. Memiliki sumber daya manusia:
- Tenaga ahli berpengalaman dalam menyusun kebijakan nasional perkotaan dan perencanaan pembangunan perkotaan dengan Pemerintah;
  - Tenaga manajerial; serta
  - Tenaga teknis (jika diperlukan).
- g. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan)
- h. Konsultan bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan seperti yang dijelaskan dalam KAK dan harus menyediakan ruang kantor, fasilitas, staf, dan peralatan yang akan memungkinkannya untuk melaksanakan tugas secara tepat waktu.

### 3.3. KEBUTUHAN PERSONIL

- 3.3.1. Pelaksana kegiatan ini merupakan perusahaan jasa konsultan yang bertugas untuk membantu Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelesaian rangkaian kegiatan Jasa Konsultansi Persiapan Pelaksanaan Hibah Fasilitas Lingkungan Global: Program Dampak Kota Berkelanjutan di Indonesia. Konsultan wajib untuk melengkapi personil tim yang dapat mengerjakan ruang lingkup tersebut di atas dengan kualifikasi tenaga ahli pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 2 Kualifikasi Tenaga Ahli**

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
<i>Team Leader</i> (Ahli Pengembangan Wilayah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang Perencanaan Wilayah Kota/Ilmu Lingkungan/Teknik Lingkungan atau bidang yang relevan dengan pembangunan perkotaan berkelanjutan.</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 10 tahun dalam bidang perencanaan kota berkelanjutan yang dibuktikan dengan surat referensi pemberi kerja sebelumnya</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai <i>team leader</i> dalam bidang perencanaan/ pembangunan kota.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan wilayah dan kota/teknik lingkungan (ahli madya) atau publikasi dalam bidang tersebut yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
Tenaga Ahli Perencanaan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang perencanaan kota atau bidang yang relevan dengan pembangunan perkotaan berkelanjutan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 7 tahun di bidang perencanaan kota, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan kota (ahli madya) atau publikasi dalam bidang tersebut yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Ahli Perlindungan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang teknik lingkungan/ilmu lingkungan/kehutanan/ teknik sipil dan lingkungan/arsitektur lanskap atau bidang yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 7 tahun dalam pekerjaan terkait pengelolaan lingkungan/ pengelolaan sampah dan limbah/perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang teknik lingkungan/ilmu lingkungan/kehutanan/ teknik sipil (ahli madya) atau publikasi dalam bidang tersebut yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Memiliki kemampuan analisis dan proyeksi terhadap kerusakan lingkungan di masa mendatang yang dibuktikan dengan hasil kajian sebelumnya (disampaikan dalam bentuk tautan/<i>softcopy</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> </ul>	10 Bulan

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	
Tenaga Ahli Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang ekonomi/bisnis atau bidang yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memiliki pengalaman minimal 7 tahun di bidang pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang ekonomi/bisnis (ahli madya) atau publikasi dalam bidangnya yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Ahli Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang sosiologi/sosial ekonomi/antropologi/ilmu budaya atau bidang yang relevan dengan dampak sosial.</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 7 tahun dalam pekerjaan terkait kajian sosial, budaya, humaniora yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Memiliki kemampuan analisis dan pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang dibuktikan dengan hasil kajian sebelumnya (disampaikan dalam bentuk tautan/<i>softcopy</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan



Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
Tenaga Ahli Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang kebijakan publik/studi pembangunan atau bidang yang relevan dengan pengelolaan proyek pembangunan berkelanjutan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 7 tahun di bidang kebijakan publik, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Memiliki sertifikat keahlian di bidang kebijakan publik/studi pembangunan (ahli madya) atau publikasi dalam bidangnya yang menjadi referensi internasional atau regional atau nasional</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Ahli Muda Pembiayaan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang ekonomi/studi pembangunan atau bidang yang relevan dengan keuangan/pembiayaan perkotaan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam bidang pembiayaan pembangunan (diutamakan pembiayaan pembangunan perkotaan) yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Ahli Muda Lingkungan (GIS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang teknik lingkungan/ilmu lingkungan/kehutanan atau bidang yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup/pembangunan berkelanjutan</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam program/proyek-proyek pembangunan terutama pembangunan perkotaan/pengelolaan lingkungan/pengelolaan sampah dan limbah/ perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> </ul>	10 Bulan

Posisi	Kualifikasi	Masa Kontrak
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Menguasai dan mampu mengoperasikan aplikasi perpetaan (ArcGIS, QGIS,dll) dan memiliki kemampuan analisis spasial.</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	
Tenaga Ahli Muda Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal magister (S2) di bidang komunikasi/kebijakan publik atau bidang yang relevan dengan perencanaan partisipatif/partisipasi publik</li> <li>● Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang advokasi komunikasi publik, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki pengalaman bekerja di proyek yang terkait dengan uji coba percontohan, survei lapangan, dan studi kelayakan (<i>feasibility study</i>).</li> <li>● Bersedia ditugaskan ke berbagai lokasi untuk mendukung pekerjaan.</li> <li>● Bersedia bekerja secara <i>full time</i> selama durasi proyek berlangsung serta tidak terlibat dalam proyek lain di lingkup PPK PPN II.</li> <li>● Memiliki kemampuan komunikasi dalam Bahasa Inggris secara professional (dibuktikan melalui dokumen pendukung seperti sertifikat pendidikan berbahasa Inggris, sertifikat tes kemampuan berbahasa Inggris atau ijazah pendidikan dari luar negeri).</li> </ul>	10 Bulan
Tenaga Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pendidikan minimal Diploma III di bidang administrasi keuangan/akuntansi/ekonomi/manajemen</li> <li>● Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, khususnya dalam proyek-proyek pemerintahan, yang dibuktikan dengan referensi dari pemberi kerja sebelumnya.</li> <li>● Diutamakan memiliki pengalaman bekerja untuk proyek yang didanai pinjaman/hibah luar negeri.</li> <li>● Memiliki kemampuan dalam mengolah data keuangan dan menyusun laporan keuangan.</li> <li>● Menguasai dan terampil dalam mengoperasikan komputer, minimal <i>Microsoft Office (Word dan Excel)</i></li> </ul>	10 Bulan

### **3.4. METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA**

- 3.4.1. Metode pengumpulan data dilakukan secara primer (survei lapangan/FGD/diskusi publik/lokakarya) dan sekunder (data tabular dan spasial kementerian-lembaga atau pemerintah daerah/studi literatur/studi *benchmarking*).
- 3.4.2. Metode pengumpulan data dan analisis data spasial maupun tabular dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan standar/ketentuan yang berlaku.
- 3.4.3. Pemetaan dan penyusunan basis data dilakukan atas seluruh informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan perangkat lunak yang tepat, program dan alat untuk memastikan hasil pemetaan dan penyusunan basis data digital dapat menjamin keberlanjutan analisis di masa depan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.
- 3.4.4. Metode analisis data tabular dilakukan dengan menggunakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta K/L/D wali data atau dari basis data tabular yang dimiliki oleh konsultan atau dengan akuisisi data tabular lainnya yang handal dan tersedia di pasar. Untuk data yang tidak tersedia, digunakan metode pengumpulan data primer.
- 3.4.5. Metode analisis spasial dilakukan dengan menggunakan peta dasar dan peta tematik yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) serta K/L/D wali data atau dari basis data spasial yang dimiliki oleh konsultan atau dengan akuisisi data spasial lainnya yang handal dan tersedia di pasar. Untuk data yang tidak tersedia, digunakan metode pengumpulan data primer.
- 3.4.6. Konsultan dapat mengusulkan metode tambahan untuk memastikan kualitas keluaran kajian. Metode pengumpulan dan analisis data yang disepakati dengan Tim Internal akan digunakan dalam laporan antara dan akhir Konsultan.
- 3.4.7. Seluruh aspek metode kajian harus secara jelas dijabarkan termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Seluruh metode dan teknik yang akan digunakan;
  - b. Teori yang akan dibangun beserta asumsi yang akan digunakan;
  - c. Teknik analisis dan pemetaan, utamanya untuk penentuan desain proyek dan pemetaan kondisi spasial dan aspasial dari kota intervensi .
- 3.4.8. Basis data spasial dan tabular yang akan diserahkan di akhir kegiatan penyusunan kajian harus dilengkapi dengan instruksi yang memungkinkan pemutakhiran data, serta pemantauan dan evaluasi implementasi kegiatan.

### **3.5. KETENTUAN PEMETAAN KOMPILASI BASIS DATA**

- 3.5.1. Untuk kebutuhan pemetaan dan kompilasi basis data dari seluruh informasi yang terkumpul, Bappenas mengharuskan Penyedia Jasa untuk menggunakan perangkat lunak, program, dan alat yang tepat untuk memastikan pemetaan dan analisis digital dapat dilakukan di masa depan dengan menggunakan basis data yang ada. Basis data ini harus dapat digunakan di masa depan untuk pengelolaan dan perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan daerah di Indonesia.

- 3.5.2. Basis data meliputi seluruh data spasial dan tabular yang terkumpul pada saat proses mempersiapkan kajian dengan memperhatikan juga potensi data yang akan tersedia di masa depan.
- 3.5.3. Seluruh perangkat lunak dan format data diatur oleh wali data di Indonesia dengan memperhatikan kompatibilitas antarperangkat.
- 3.5.4. Untuk data tabular, format file **.dbf** harus dapat digunakan dengan *MS Excel* dan *MS Access*. Bappenas memiliki akses ke data tematik yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial dan data mikro yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik dalam format digital.

**4. BAGIAN 4: PENUTUP**

Demikian KAK ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, September 2021

Mengetahui,  
PPK PROGRAM PERENCANAAN  
NASIONAL II,



ZULFAKAR, S. Kom, ME

NIP. 19691124 199403 1 004